



KR-Warisman

Pelaksana Tugas Ketua Harian Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa (MLPTs) Ki Prof Drs Pardimin MPd PhD membantu satu unit kompresor untuk SMK Tamansiswa Cabang Songbanyu Kapaneuwun Girisubo Gunungkidul. Penyerahan bantuan oleh Bendahara Harian MLPTs Harianto STp MSI, berlangsung di ruang pertemuan SMK Tamansiswa Songbanyu, Sabtu (23/1). Bantuan ini sebagai stimulan untuk kelengkapan praktik dan produksi dan diterima Ketua Cabang Tamansiswa Songbanyu Ki Drs Supriyadi MM.

PTKM Diperpanjang, Kampus Pilih Daring

YOGYA (KR) - Keputusan pemerintah memperpanjang kebijakan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM), berdampak pada pembelajaran di sekolah maupun di kampus. Dengan adanya perpanjangan tersebut mau tidak mau sistem pembelajaran daring (online) juga harus dilanjutkan. Semua itu perlu dilakukan, karena penambahan jumlah kasus yang masih tinggi dan belum memungkinkan dilakukan pembelajaran tatap muka.

"Kebijakan pemerintah untuk memperpanjang PTKM menunjukkan, grafik penurunan Covid-19 belum seperti yang diharapkan pemerintah. Untuk itu kami berharap kesadaran masyarakat terhadap penerapan proses semakin ditingkatkan. Kalau tidak, kondisi seperti ini akan terus berlanjut dan berkepanjangan akibatnya merugikan segala sektor, termasuk bidang pendidikan," kata Direktur Akademi Pariwisata Stipary Yogyakarta, Suharto SE MPar, Minggu (24/1).

Suharto mengungkapkan, selama ini Akpar Stipary menerapkan metode *blended learning*, yaitu campuran antara daring dan luring. Namun, dengan adanya PTKM mahasiswa yang memilih pembelajaran daring semakin meningkat. Karena secara psikologi ada perasaan kurang aman kalau mereka beraktivitas di luar. Apalagi mahasiswa yang berasal dari luar DIY, mereka lebih nyaman mengikuti pembelajaran secara daring.

"Menyikapi kondisi ini kami terus

berupaya melakukan pembenahan, baik kurikulum maupun peningkatan fasilitas pembelajaran lainnya. Untuk rencana pembelajaran tatap muka terbatas pada Februari, kami masih menunggu kebijakan pemerintah. Prinsipnya dari segi persiapan Stipary sudah sangat siap menyambut apapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah," paparnya.

Komentar senada diungkapkan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah V DIY Fathul Wahid. Menurutnya, sampai saat ini mayoritas kampus di DIY masih melakukan pembelajaran secara daring, dengan berbagai macam pertimbangan. Seandainya ada yang melakukan pembelajaran model luring masih sangat sedikit. Biasanya hal itu berkaitan dengan kegiatan praktikum yang tidak bisa dilakukan secara daring. (Ria)

UKDW Gelar Webinar Penguatan MBKM

YOGYA (KR) - Biro Kerjasama dan Relasi Publik (Biro IV) Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta mengadakan webinar 'Pengelolaan Kerja Sama dan Dokumentasinya untuk Penguatan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka'. Kegiatan ini dalam rangka mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan penguatan kerja sama dengan para mitra.

Narasumber yang hadir adalah Firman Hidayat SS MSi, Sub Koordinator Kerja Sama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud serta Dr Maria Anityasari ST ME, Direktur Kemitraan Global Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Dalam sambutannya Rektor UKDW Yogyakarta Ir Henry Feriadi MSc PhD mengatakan, tujuan utama MBKM adalah menyiapkan mahasiswa agar siap menerima tantangan profesi dan pekerjaan yang akan datang serta siap berinovasi menghadapi tantangan yang akan datang. "Bicara tentang pengelolaan kerja sama dalam konsep MBKM, melibatkan industri dan pihak di luar kampus untuk melakukan kerja sama. Salah satunya mahasiswa bisa mengambil mata kuliah di beda fakultas, beda universitas atau magang di perusahaan dan lapangan pekerjaan yang lainnya. Supaya program ini dapat berjalan baik, diperlukan pengelolaan dokumen kerjasama dan perundingan yang baik," tutur Henry dalam siaran persnya kepada KR, Minggu (24/1).

Dalam webinar tersebut, Firman Hidayat SS MSi menyampaikan, pada konsep MBKM mahasiswa diberikan hak belajar tiga semester di luar program studi. Terkait implementasinya bisa disesuaikan dengan karakteristik masing-masing perguruan tinggi. (Aha)

GURU TAK BOLEH MONOTON Perlu Kuasai Metode Pembelajaran Daring

MAGELANG (KR) - Masa pandemi Covid-19 yang belum usai, menjadi tantangan pihak sekolah dan guru di wilayah Kota Magelang. Mereka diminta mengembangkan dan memaksimalkan metode pembelajaran kepada para siswanya dan harus mampu mengembangkan inovasi dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Drs Agus Sujito kepada KR, Sabtu (23/1) malam. Berbagai aplikasi digital dapat dimanfaatkan para guru, sesuai kemampuan guru dan siswa. Misalnya, mengajak siswa menggunakan aplikasi seperti SiPintar, Rumah Belajar, Google Form atau Google Classroom.

Untuk bertatap muka atau review mandiri secara virtual, ada juga yang menggunakan aplikasi Zoom sebagai pengganti penilaian harian (PH). Manakala guru memerlukan penilaian fisik, terkadang meminta para siswa mengirimkan dokumen berupa video. "Artinya tidak monoton dengan menggunakan satu metode pembelajaran. Tidak setiap pembelajaran daring siswa hanya diminta membaca buku materi dan menjawab soal, kemudian melaporkan kepada guru melalui foto tugas atau mengisi form," kata Agus Sujito.

Berbagai metode yang dikuasai guru di saat pembelajaran tatap muka lalu, dapat diaplikasikan dalam pembelajaran daring di masa pandemi ini. Guru dinilai lebih memahami penggunaan metode yang sesuai. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran daring, tambah Agus Sujito, guru harus mampu mengoptimalkan konsentrasi siswa pada 20 menit pertama. (Tha)

Pembebasan UKT Mahasiswa Terdampak Gempa

SALAH satu dampak terjadinya bencana alam, seperti gempa bumi di Sulawesi Barat (Sulbar) adalah terjadinya kesulitan pembiayaan kuliah mahasiswa di perguruan tinggi. Oleh karena itu, langkah tepat bila kemudian Universitas Negeri Makassar (UNM) Sulawesi Selatan mengambil kebijakan membebaskan uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa terdampak gempa di Provinsi Sulbar. Rektor UNM Prof Husain Syam di Makassar mengatakan, kebijakan tersebut berlaku bagi mahasiswa Sulbar mulai jenjang pendidikan S1 hingga S3 (KR, Selasa (19/1)).

Kebijakan keringanan pembiayaan UKT ini ternyata juga sejalan dengan program yang dicanangkan Dirjen Dikti Kemendikbud, Nizam. Ia menyebutkan, kebijakan keringanan pembiayaan UKT untuk PTN dan PTS tetap dilanjutkan. Selain itu bantuan uang kuliah juga masih disiapkan untuk semester ini.

Selain karena terjadinya bencana alam seperti di Sulbar, kebijakan tersebut ternyata mempertimbangkan masih berlangsungnya pandemi Covid-19 di Indonesia yang hingga kini masih belum teratasi.

Menurut keterangan Dirjen Dikti, tidak ada perubahan jumlah bantuan UKT yang

akan disalurkan. Bantuan diberikan lewat Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K). Total anggaran yang disalurkan sebesar Rp 1,007 triliun. Dana bantuan bakal langsung diberikan kepada perguruan tinggi. Bantuan ini dikhususkan untuk mahasiswa yang perkonomiannya terdampak pandemi Covid-19 agar tidak ada mahasiswa yang putus kuliah di tengah wabah Covid-19 ini.

Keringanan lainnya, kata Nizam, perguruan tinggi dapat membuat skema UKT baru kepada mahasiswa. Misalnya mahasiswa di masa akhir kuliah hanya diwajibkan membayar maksimal 50 persen dari UKT, dengan syarat jika mengambil maksimal enam SKS. Mahasiswa juga bisa mendapatkan keringanan cicilan pembayaran UKT dari perguruan tinggi. Pihak kampus juga bisa memberikan penundaan pembayaran UKT bagi mahasiswa.

Sebelumnya Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kementerian Agama (Kemendagri) juga membahas rencana pemberian keringanan UKT bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Kebijakan serupa telah diberikan pada tahun anggaran 2020 dan tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) 515/2020. (M Sobiri)

EKONOMI

UNTUK TES COVID-19 Halodoc Layani Drive Thru

SEMARANG (KR) - Sebagai wujud kontribusi membantu mengurangi transmisi Covid-19 di Kota Semarang, Halodoc selaku platform penyedia akses layanan kesehatan terpadu di Indonesia, membuka fasilitas drive thru tes Covid-19 untuk pertama kalinya di Semarang sejak 11 Januari 2021. Lokasi layanan drive thru di Area Parkir PRPP Jalan Puri Anjasmoro Tawang Sari, pukul 07.00-15.00.

"Pembukaan beberapa fasilitas drive thru baru di luar Jakarta, termasuk di Semarang merupakan bagian dari komitmen kami untuk senantiasa membantu Pemerintah dalam menekan laju penyebaran Covid-19 di Tanah Air. Mengingat angka kasus positif Covid-19 yang naik cukup tajam dibanding akhir tahun lalu," ujar Dionisius Nathaniel, Chief Marketing Officer Halodoc, Sabtu (23/1).

Dikatakan Dion, dengan semakin banyak warga yang melakukan tes mandiri, potensi infeksi Covid-19 dapat terdeteksi lebih dini, sehingga masyarakat dapat segera melakukan intervensi yang diperlukan. Sama seperti fasilitas drive thru di lokasi lainnya, drive thru Halodoc di Semarang menawarkan berbagai jenis tes Covid-19, mulai dari tes cepat (rapid) antibodi, tes swab antigen, hingga tes PCR dengan harga beragam.

"Hingga akhir Maret 2021, Halodoc memberikan diskon spesial untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan," katanya. (San)

DORONG PEMULIHAN EKONOMI

Tingkatkan Kontribusi Keuangan Syariah

JAKARTA (KR) - Peran sektor jasa keuangan menjadi sangat krusial sebagai katalis penggerak dalam memulihkan perekonomian termasuk kontribusi dari sektor ekonomi dan keuangan Syariah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sektor jasa keuangan Syariah tetap mampu tumbuh cukup tinggi sebesar 21,58 persen (yoy), bahkan pembiayaan bank umum Syariah tumbuh 9,5 (yoy) persen di tengah kontraksi kredit perbankan nasional -2,41 persen selama pandemi Covid-19 tahun 2020.

Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Wimboh Santoso mengatakan, perkembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia juga turut diapresiasi dunia internasional. Indonesia telah diakui sebagai salah satu negara de-

ngan progres terbaik dalam hal ekonomi dan keuangan Syariah sepanjang 2020 lalu. Sebagai negara dengan 87 persen atau setara 230 juta penduduk muslim, Indonesia memiliki potensi pengembangan ekonomi dan industri keuangan Syariah yang sangat besar.

"Pertumbuhan ekonomi Syariah yang tinggi tercatat sebesar 5,72 persen pada 2019 lalu sehingga lebih tinggi dibanding pertumbuhan PDB nasional. Semakin meningkatnya industri halal Indonesia dengan nilai perdagangan antara lain makanan, kosmetik dan obat-obatan, travel, fashion mencapai USD 3 miliar pada 2020 lalu dan terus dalam tren meningkat," tutur Wimboh pada pembukaan Musyawarah Nasional MES V secara virtual di Jakarta, Sabtu (23/1).

Wimboh menegaskan, tantangan yang harus segera diatasi yakni market share relatif masih 9,90 persen dari total aset nasional dan masih rendahnya literasi keuangan Syariah 8,93 persen. Sementara itu, Indeks Inklusi Keuangan Syariah yang sebesar 9,1 persen juga masih jauh tertinggal dibandingkan indeks nasional sebesar 76,19 persen.

Selain itu, diferensiasi model bisnis/produk Syariah juga masih terbatas sehingga diperlukan inovasi dan kreativitas pelaku industri jasa keuangan Syariah. "Peningkatan adopsi teknologi dan perlunya SDM dengan ekspertisi di bidang ekonomi dan keuangan Syariah untuk mengikuti berbagai dinamika dan perubahan kondisi perekonomian maupun teknologi saat ini," ujarnya. (Lmg/Ira)

Bank BPD DIY Garap Kredit Segmen Menengah ke Atas

YOGYA (KR) - PT Bank BPD DIY dipercaya ikut bergabung dengan bank-bank besar dalam pembiayaan segmen menengah ke atas, salah satunya terlibat dalam proyek pembangunan Jalan Tol di DIY.

Bank BPD DIY mendapatkan tanggung jawab antara lain pembayaran dana ganti pembebasan lahan melalui rekening Bank BPD DIY, penyediaan fasilitas produk dana, jasa dan kredit, kerjasama pembiayaan dana talangan tanah dan kerjasama kredit investasi untuk pembangunan tol.

Direktur Utama PT Bank BPD DIY Santoso Rohmad mengaku tidak hanya berupaya menggenjot penyaluran kredit segmen menengah ke bawah. Namun sekaligus menasar pembiayaan segmen menengah ke atas tahun ini. Bank BPD DIY dipercaya dan diberikan tanggung jawab berkontribusi dalam proses pelaksanaan pembangunan Jalan Tol di DIY. Hal tersebut telah diwujudkan dengan penan-

datangan kesepakatan Bank BPD DIY dengan PT Jogjasolo Marga Makmur (JMM) terkait proyek pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo.

"Bank BPD DIY dipercaya untuk pembayaran dana ganti pembebasan lahan melalui rekening Bank BPD DIY, penyediaan fasilitas produk dana, jasa dan kredit, kerja sama pembiayaan dana talangan tanah serta kerjasama kredit investasi untuk pembangunan tol. Pembiayaan konstruksi pembangunan jalan tol ini untuk segmen menengah ke atas," ujar Santoso di Yogyakarta, Minggu (24/1).

Menurutnya, Bank BPD DIY mengikuti kredit sindikasi dalam rangka investasi pembangunan, selanjutnya pembiayaan konstruksinya

dan pembiayaan pembebasan tanah terdampak pembangunan Jalan Tol di DIY. Dalam pembebasan tanah tersebut, sangat dibutuhkan modal kerja yang dikemas Bank BPD DIY dengan kredit jangka menengah dan kredit jangka panjang." Segmen sarannya yang dibidik adalah menengah ke

atas atau segmen korporasi dalam pembiayaan tersebut. Sudah masuk pengajuan beberapa kontraktor sebagai debitur untuk pembiayaan order alat berat dan sebagainya," tegasnya.

Santoso menyampaikan, justru kebanyakan yang telah mengajukan pembiayaan di Bank BPD DIY adalah

kontraktor lokal. Sebab pihaknya mendorong para kontraktor lokal DIY bisa ambil bagian sebagai sub kontraktor untuk pengerjaan infrastruktur tertentu proyek pembangunan Jalan Tol di DIY. Kita berharap bisa berkontribusi terhadap pemulihan dan pertumbuhan ekonomi DIY. (Ira)



Indeks Pembangunan Manusia DIY

MENURUT BPS DIY (2021), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merangkul tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Selanjutnya IPM dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Setidaknya ada tiga manfaat IPM, yaitu (BPS, 2021): (1) indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). (2) Menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. (3) Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain seba-

gai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik.

Menurut BPS (2021), dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Produk Nasional Bruto (PNB) menggantikan Pro-

duk Domestik Bruto (PDB) karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Berdasarkan tabel, capaian/level IPM DIY selama periode 2010-2019 selalu meningkat dan lebih tinggi dari capaian IPM nasional. Pada tahun 2020, capaian IPM DIY mencapai level level 79,97 dan berada dalam kategori 'IPM Tinggi' dan mencapai peringkat kedua tertinggi setelah DKI Jakarta. Pada tahun 2020, IPM DIY sedikit mengalami penurunan dari 79,99 pada tahun 2019 menjadi 79,77 pada tahun 2020. Menurut BPS

DIY (2021), penurunan tersebut dipengaruhi oleh penurunan indeks pada dimensi standar kehidupan yang layak yang tidak mampu dikompensasi oleh kenaikan indeks pada dimensi kesehatan dan dimensi pengetahuan. Untuk diketahui, Rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan selama 2020 mencapai Rp14,02 juta dan turun 2,63 persen dibandingkan dengan tahun 2019 akibat Pandemi Covid-19. Pandemi yang terjadi saat ini harus diakui berdampak terhadap segala aspek kehidupan masyarakat. Semoga pandemi cepat berlalu. (Dr Y Sri Susilo SE MSi, Dosen FBE UAJY dan Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta).

Tahun	DIY	Indonesia
2010	75,37	66,53
2011	75,93	67,09
2012	76,15	67,70
2013	76,44	68,31
2014	76,81	68,90
2015	77,59	69,55
2016	78,38	70,18
2017	78,89	70,81
2018	79,53	71,39
2019	79,99	71,92
2020	79,77	71,94

Sumber: BPS DIY (2021) 